

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2013-2017**

**NURHASANAH
NIM. 160461201107**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : NURHASANAH

Nim : 160461201107

Jurusan : Manajemen Keuangan

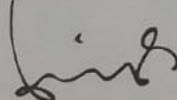
Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017.

Disetujui untuk digunakan dalam (Seminar Proposal/Seminar Hasil/Sidang Skripsi)

Menyetujui,

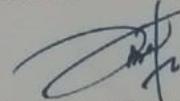
Dosen Pembimbing I



Firmansyah Kusasi, ST.,MM

NIDN. 1020116701

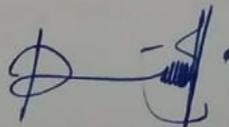
Dosen Pembimbing II



Nurhasanah, SE., M.Si

NIDN. 0008098303

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Maritim Raja Ali Haji**



**Risdy Absari Indah Pratiwi, S.E., M.Si
NIP. 19901213 201803 2 001**

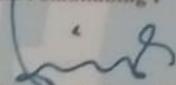
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : NURHASANAH
NIM : 160461201107
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dosen penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji

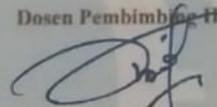
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



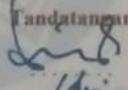
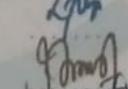
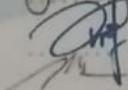
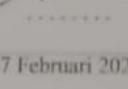
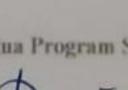
Firmansyah Kusasi, S.T.,MM.
NIDN. 1020116701

Dosen Pembimbing II



Nurhasanah, SE.,M.Si
NIDN. 0008098303

Panitia Penguji,

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Firmansyah Kusasi, ST.,MM NIDN. 1020116701	Penguji 1		9/02/20
2. Lia Suprihartini, SE.,MM NIP. 19821001 201404 2 001	Penguji 2		10/02/20
3. Hj. Iranita, SE.,M.Si NIDN. 1027087003	Penguji 3		10/2 2020
4. Nurhasanah, SE.,M.Si NIDN. 0008098303	Penguji 4		1/02/2020
5. Akhirman, S.Sos.,MM NIDN. 1004086501	Penguji 5		7/02/20

Tanggal Ujian Sidang Skripsi dan Komprehensif: 7 Februari 2020
Mengetahui,



Ketua Program Studi Manajemen



Risdy Absari Indan Pratiwi, SE.,M.Si
NIP. 19901213 201803 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHASANAH

Nim : 160461201107

Jurusan : Manajemen

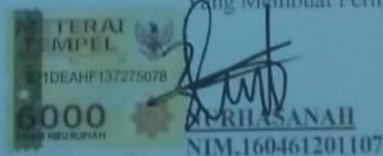
Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Maritim Raja Ali Haji maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka; dan
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tanjungpinang, Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,



ABSTRAK

NURHASANAH 2020: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017. Dosen Pembimbing: Firmansyah Kusasi, ST., MM dan Nurhasanah, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Metode full Sampling sehingga diperoleh 5 Kabupaten dan 2 Kota yang menjadi sampel. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Biro Pusat Statistik (BPS). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik Asumsi Klasik, MRA dengan SPSS. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dengan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dengan koefisien negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (5) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. (6) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

ABSTRAC

NURHASANAH 2020: The Effect of Local Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditures and Economic Growth as Moderating Variables in Regency / City of Riau Islands Province in 2013-2017. Supervisor: Firmansyah Kusasi, ST., MM and Nurhasanah, SE., M.Sc

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditures and Economic Growth as a Moderating Variable in Riau Islands Province / City in 2013-2017. The population in this study were all regencies / cities in Riau Islands Province in 2013-2017. The research sample was determined using the full sampling method so that 5 districts and 2 cities were sampled. Sources of data in this study are secondary data sourced from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Central Bureau of Statistics (BPS). The method used in this research is using quantitative research methods using Classical Assumption techniques, MRA with SPSS. The results of the study can be concluded that (1) Regional Original Revenue has a positive and significant effect on capital expenditure. (2) General Allocation Funds do not have a negative and not significant coefficient on capital expenditure. (3) Economic growth influences the negative and significant coefficient on capital expenditure. (4) Economic Growth is able to moderate Regional Original Revenue to Capital Expenditures (5) Economic Growth is able to moderate General Allocation Funds towards Capital Expenditures. (6) Regional Original Revenues and General Allocation Funds simultaneously (simultaneously) affect Capital Expenditures in Regency / City of Riau Islands Province in 2013-2017.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Funds, Economic Growth, Capital Expenditures

MOTO

Ujian yang kau anggap melelahkan sejatinya ada dosa mu yang Allah gugurkan

(NURHASANAH)

Pepatah pernah mengatakan “Saat kau menyerah, kau mulai mencari alasan, saat kau berpikir kau bisa melakukannya, kau menemukan jalanya”

(Kim Sabu, Romantic Doctor Kim II)

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta Ayahanda Ibunda yang ku sayangi, kepada saudara saudara kandungku, kepada sahabat-sahabatku, Terimakasih telah memberi semangat, dukungan, saran dan doa sampai saat ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Al-Hamdu Lillah kami persembahkan kehadirat ALLAH SWT pengatur alam semesta yang karena Rahmat, Rahimnya, Taufiq, hiyahnya, Nikmat, Karunia- Nya kepada kami sehingga kami mampu merampungkan pembuatan Skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017.**

Skripsi ini untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk lulus pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ekonomi. Berkat pertolongan dari berbagai pihak yang mau meluangkan waktu dan pikirannya sehingga kami bisa merampungkan proses pembuatan Skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberi doa, nasihat, motivasi, dan kasih sayang yang tak terkira nilainya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafsir Akhlus, M.Sc, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
3. Bapak Dr.M. Syuzairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji
4. Ibu Risdy Absari Indah Pratiwi,S.E.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

5. Ibu Lia Suprihartini, SE.,MM, selaku Sekretaris Program Studi Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
6. Bapak Firmansyah Kusasi, ST.,MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Skripsi.
7. Ibu Nurhasanah,SE.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya Skripsi.
8. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
9. Seluruh Staff TU Fakultas Ekonomi Program Studi Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah membalas dengan kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Proposal ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang Februari 2020
Penulis,

NURHASANAH

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan masalah.....	10
1.4. Batasan masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS.....	15
2.1.Kajian Pustaka	15

2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	15
2.2.2 Belanja Modal (BM)	16
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	23
2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2.6 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2. Penelitian Terdahulu	32
2.3. Kerangka Pemikiran	34
2.4. Pengembangan Hipotesis	35
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	35
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	35
2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal	36
2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	37
2.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	38
2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Pendapatn Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhdap Belanja	39
2.5. Hipotesis Penelitian	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.2 Metode Penelitian	41
3.3 Operasional Variabel Penelitian	42
3.4 Metode Penentuan Populasi dan Sampel.....	43
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.6 Metode Analisis	44
3.6.1 Uji Statitik Deskriptif.....	44
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	44
3.6.2.2 Uji Multikoleniaritas.....	45
3.6.2.3 Uji Autokorelasi.....	46
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas	46
3.6.3 Uji Regrasi Moderating	47
3.6.4 Uji Hipotesis.....	48
3.6.4.1 Uji t (Uji Koefesien Secara Parsial)	48
3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	49
3.6.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Unit Analisis Observasi	51
4.2 Hasil Analisis Data	51
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	52

4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	53
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	57
4.3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas	58
4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi	60
4.5 Hasil Uji Hipotesis.....	64
4.5.1 Hasil Uji Parameter Individual (uji t).....	65
4.5.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	67
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
4.6 Hasil Penelitian dan Pembahasan	69
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	69
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	70
4.6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal.....	71
4.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderating dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	72
4.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderating dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	73
4.6.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderating terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA..... 79
DAFTAR LAMPIRAN 82

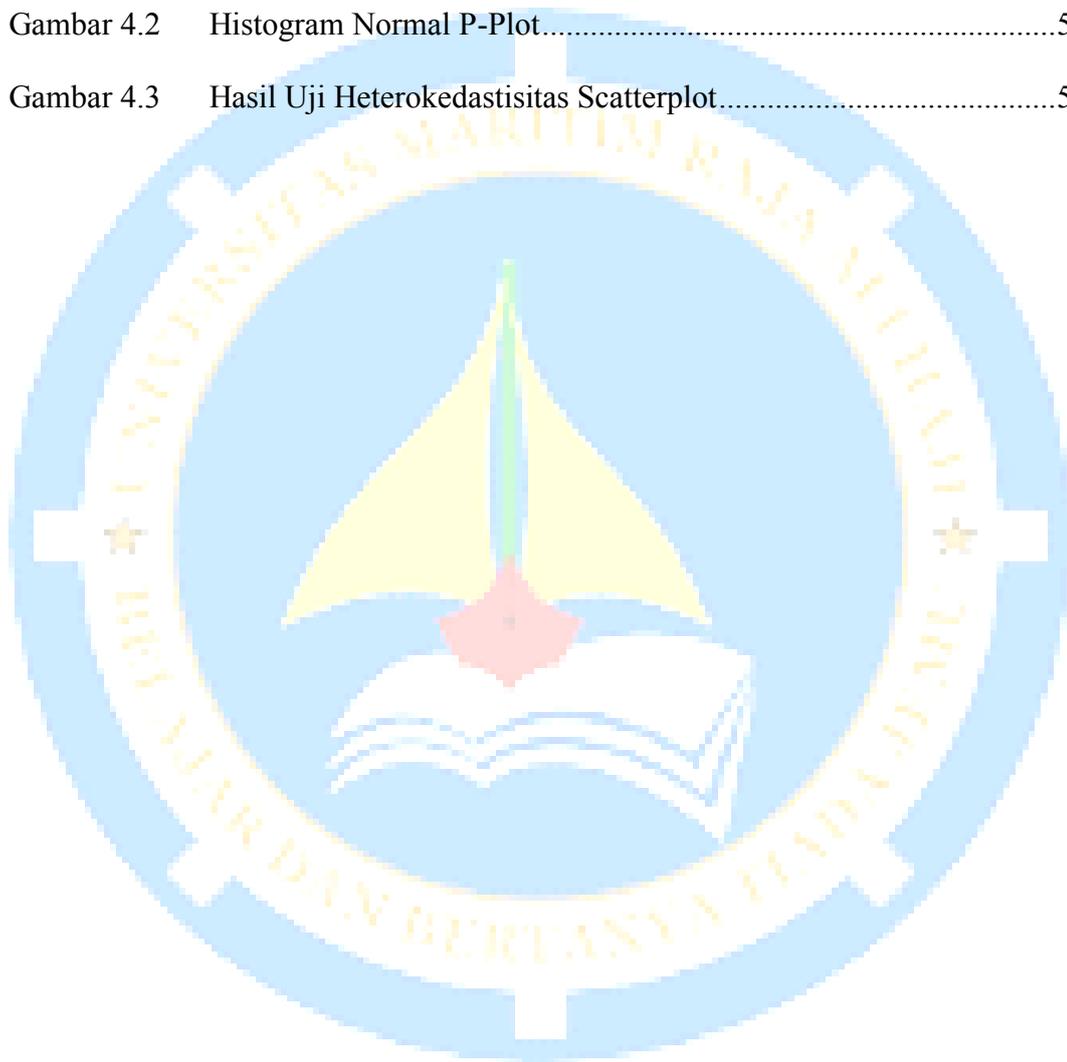


DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau	2
Tabel 1.2	Persentasi Belanja Modal Kepulauan Riau.....	4
Tabel 1.3	Persentasi Pendapatan Asli Daerah.....	5
Tabel 1.4	Persentasi Dana Alokasi Umum	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Variabel Operational	42
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	43
Tabel 4.1	Objek Penelitian	51
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas KS	55
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolonieritas	56
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.6	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi moderasi Tahap I	60
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Moderasi Tahap II	62
Tabel 4.9	Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (uji t).....	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Tahap I.....	67
Tabel 4.11	Hasil Uji Signifikan Simultan (uji F) Tahap II	67
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefesien Determinasi Tahap I.....	68
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefesien Determinasi Tahap II.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Probability Plot.....	54
Gambar 4.2	Histogram Normal P-Plot.....	54
Gambar 4.3	Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori menengah ke bawah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi umum pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 menurun ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 5,78%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh perang dagang negara yang tadinya berdampak krisis di China dan Amerika Serikat. pada waktu AS ubah kebijakan moneter itu, guncangan di negara negara *emerging market* termasuk Indonesia, terjadi arus keluar modal cukup besar. Lesunya pertumbuhan ekonomi global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara melambat, pelambatan pertumbuhan ekonomi seperti anjloknya konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari kenaikan harga pangan, mahal nya

harga pangan membuat masyarakat mengerem belanjanya. Penurunan pertumbuhan negara Indonesia berdampak pula pada daerahnya, seperti Tabel Pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau mengalami Penurunan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

Pertumbuhan Ekonomi – Tahunan Kepulauan Riau				
2013	2014	2015	2016	2017
7.21	6.60	6.01	5.03	2

Sumber (www.bps.go.id.kepri).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Kepri bahwasanya ada beberapa sektor yang menjadi pemicu terpuruknya pertumbuhan ekonomi Kepri yakni sektor industri pengolahan, sektor konstruksi/infrastruktur dan sektor pertambangan dan penggalan. Kontribusi sektor industri pengolahan menurun pada tahun 2017 Menjadi sebesar 36,13%. Kontribusi sektor konstruksi juga fluktuatif pada kisaran antara 17,03%-18,21%. Sementara itu kontribusi sektor pertambangan dan penggalan menurun dari sebesar 15,96% pada tahun 2013 menjadi 14,21% pada tahun 2017.

Oleh karena itu, untuk mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri, yakni dengan menggali potensi daerah daerah di kepulauan riau dengan dibutuhkan pemerataan sektor industri ke daerah lainya. Peran FTZ Batam diharapkan semakin meningkat dalam memacu perekonomian di Kepulauan Riau Sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi yang

besar di Kepulauan Riau, baik yang berasal dari domestik (dalam daerah) maupun dari luar.

Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri. Maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tujuan Ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan agar fasilitas publik dan penunjang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di daerah, tentunya hal tersebut akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah daerah memiliki porsi belanja pegawai mencapai 70% - 80% dari total Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Porsi belanja pegawai yang terlalu besar perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Belanja infrastruktur dan belanja modal seharusnya lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30% dari total APBD, (dalam artikel situs Kemendagri pada tanggal 11 Desember 2013 dengan alamat <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41belanjamodalpemdaharuscapai30->

persen), sementara persentasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2013-2017 masih banyak yang belum memenuhi himbauan tersebut. Adapun persentase Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data persentasi belanja modal terhadap total belanja merupakan persentase data realisasi belanja modal terhadap belanja daerah.

Tabel 1.2 Persentasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013- 2017

No	Kabupaten/Kota	% Belanja Modal terhadap Total Belanja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Tanjungpinang	17%	22%	9%	20%	17%
2	Kota Batam	21%	25%	24%	25%	25%
3	Kabupaten Bintan	27%	23%	18%	23%	20%
4	Kabupaten Lingga	32%	25%	20%	12%	15%
5	Kabupaten Natuna	23%	21%	16%	20%	16%
6	Kabupateen Karimun	20%	16%	10%	15%	22%
7	Kabupaten Anambas	28%	27%	35%	33%	18%

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh persentasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Kepri tidak mencapai 30%. Bahkan persentasi belanja modal kota Tanjungpinang pada 2015 hanya mencapai 9%. Selama kurun 5 tahun, hanya Kabupaten Anambas yang memenuhi imbauan Pemerinah Pusat yaitu pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 35% dan 33%.

Rendahnya porsi belanja modal dibandingkan belanja operasi diindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menganggarkan alokasi belanja modal untuk anggaran sektor publik. Saragih dalam penelitian Suryani dan Pariani (2018), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Stine dalam penelitian yang sama menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik.

Undang Undang No.33 Tahun 2004 mengatakan bahwa sumber penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran sangat penting dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah yaitu sektor pajak dan retribusi daerah. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). Pendapatan Asli Daerah memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

Tabel 1.3 Persentasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017.

No	Kabupaten/Kota	% Realisasi Pendapatan Asli Daerah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Tanjungpinang	126%	128%	116%	87%	14%
2	Kota Batam	119%	130%	234%	177%	84%
3	Kabupaten Bintan	102%	121%	112%	606%	196%
4	Kabupaten Lingga	169%	110%	97%	76%	101%
5	Kabupaten Natuna	150%	104%	57%	15%	113%
6	Kabupateen Karimun	134%	151%	138%	650%	93%
7	Kabupaten Anambas	77%	68%	45%	14%	130%

Sumber : *dpjk. Kemenkeu.go.id*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persenan realisasi pendapatan asli daerah tiap Kabupten/Kota mengalami Fluktuasi ini karena Permasalahan yang

terjadi terkait tidak menentukannya penerimaan PAD terhadap penerimaan daerah adalah belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah, masih terbatasnya sumberdaya pemerintah yang berkualitas, belum optimalnya budaya kerja dalam melaksanakan pelayanan publik, sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai, belum optimalnya pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan otonomi daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan langkah strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal. Seperti diberlakukannya Pajak kendaraan bermotor, Pajak bbm motor, Pajak rokok, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. dll. Dalam hal ini daerah diberi kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi Pajak dan Retribusi yang ada di wilayahnya untuk dapat dipungut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan Investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan semakin baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara suatu daerah dnegan daerah lainya. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal

ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam dalam pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi. Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Tabel 1.4 Persentasi Dana Aloaksi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	% Efektivitas Dana Alokasi Umum				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Tanjungpinang	40%	42%	47%	48%	49%
2	Kota Batam	31%	30%	28%	26%	27%
3	Kabupaten Bintan	32%	35%	38%	43%	46%
4	Kabupaten Lingga	42%	47%	54%	55%	56%
5	Kabupaten Natuna	14%	17%	19%	29%	34%
6	Kabupateen Karimun	30%	31%	31%	33%	40%
7	Kabupaten Anambas	25%	26%	29%	38%	43%

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.

Dari tabel diatas beberapa kota mengalami peningkatan transfer dari pusat seperti Kota Tanjungpiangg, Kabupaten Bintan, Kabupaten lingga Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimum sisanya seperti Kota Batam dan Anambas mengalami Fluktuasi ini karena pemerintah menghemat Dana Alokasi Umum untuk megantisipasi defisit anggaran belanja pemerintah tidak mampu ditutup dengan penerimaan negara. Kegunaan dana perimbangan adalah dengan memberlakukan dana dari pusat untuk membangun infrastruktur, mampu meningkatkan perkembangan di berbagai sektor seperti, sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan target yang direncanakan pemerintah maupun pribadi.

Selain itu, hal ini berguna pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran khususnya dalam menyediakan ruang lapangan kerja yang luas. Untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur pemerintah menggunakan biaya modal Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penelitian ini dimotivasi karena adanya perbedaan hasil penelitian - penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk mereplikasi dan mengeksplorasi penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Wayan dan Fridayana Yudiatmaja (2016) yang meneliti pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian menurut Edi Susanto dan Marhamah (2016) PAD dan DAK berpengaruh

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini termotivasi mendorong penulis tertarik menguji kembali dua variabel independen diatas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap Belnja Modal. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terebut. Penulis mnggunakan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen, tempat penelitian dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan runtun tahun 2013-2017.

Berdasarkan beberapa paparan dan penejelasan diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2013-2017”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun permasalahan yang dapat di identifikasi yaitu dimana :

1. Terjadi Penurunan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Faktor penyebab terjadinya penurunan Pertumbuhan Ekonomi ialah industri pengolahan, kontruksi yang fluktuatif serta sektor pertambangan dan penggalian menurun.
3. Persentasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Kepri rendah dan tidak mencapai 30%.

4. Realiasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Mengalami fluktuasi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar beakang diatas rumusan masalah dalam penelitan ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Kabupaten/Kota Kepulauan Riau?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?
5. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Periode yang diambil dalam penelitian ini

adalah tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan baik dalam menerapkan teori, khususnya teori di bidang operasional ke dalam dunia praktek yang sebenarnya dan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Instansi Pemerintahan

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Kepulauan Riau untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan Belanja Modal sehingga tercipta kemandirian otonomi daerah.

3. Ilmu pengetahuan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

4. Penelitian selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan pengujian penelitian. Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam

penulisan. Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran secara garis besar penelitian serta menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan, selanjutnya disusun identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penulisan di akhir bab ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pada bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis yang ingin diuji berdasarkan teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel. Teori yang digunakan adalah teori tentang penerimaan daerah yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasional variabel penelitian, metode

pengumpulan data, teknik penentuan populasi dan sampel serta metode analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan disajikan secara terangkai (tidak terpisah) dalam satu kesatuan analisis yang memuat jawaban dari tujuan penelitian secara konsisten, hasil pengujian empiris atau temuan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi uraian simpulan yang merupakan deskripsi hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian secara konsisten dan sistematis, dan saran yang merupakan rekomendasi tindakan konkrit yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan. Bagian akhir terdiri dari: Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- **Fungsi otorisasi**, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- **Fungsi perencanaan**, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- **Fungsi pengawasan**, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- **Fungsi alokasi**, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
- **Fungsi distribusi**, artinya kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Fungsi stabilitasi**, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk memnetukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritasi pengeluaran di masa yang akan datang. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang ada perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Menurut Arif dalam Pikasari (2015) anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiaai belanja tersebut

2.1.2 Belanja Modal (BM)

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN dan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun

2005 tentang Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ - pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan asli daerah yang di dapat semakin kemungkinan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus pada pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom (Nahlia, 2014).

Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Halim, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan asli daerah yang jauh lebih besar dibanding daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan asli daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan asli daerah yang rendah. Sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Adapun macam-macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota dan menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten/kota diantaranya:

1. Pajak kendaraan
2. Pajak hotel dan restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
7. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
8. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi terdiri dari tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa jasa pelayanan tersebut yaitu retribusi yang dikenakan jasa umum, retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 7. Retribusi Terminal.
 8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 9. Retribusi Izin Trayek.
 10. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- c. Hasil Perusahaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penerimaan Pendapatan asli daerah lainnya sebagai peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan agar dikuasai serta dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
1. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 2. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 3. Bagian laba lembaga keuangan nonbank.
 4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Penerimaan jasa giro.
- c. Penerimaan bunga deposito.
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah..

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberkan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum untuk daerah

Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan masing masing 10% untuk Povinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota. Jumlah Dana Alokasi umum bagi sema daerah Provinsi tersebut dan jumlah Dana alokasi umum bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahwa penggunaan Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam (Halim, 2016:127) menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan tarnsfer dana yang bersifat “block grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan di dalam penggunaan ana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Namun demikian, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari yang diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri.

Menurut Nanda (2015) Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah dengan membandingkan antara dana alokasi umum terhadap realisasi pendapatan. Semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah. Berdasarkan

ketentuan bahwa dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah pengalokasian pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Alokasi umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity) dan dialokasikan dalam bentuk block grant. Dana alokasi umum yang dimaksud ini merupakan jumlah semua dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Menurut Machmud (2016) Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini, disebabkan karena faktor- faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Menurut Pratama dan mandala (2014:148) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiga faktor tersebut adalah:

1. Barang modal

Agar ekonomi bertumbuh stok barang modal harus ditambah, penambahan stok barang modal dilakukan lewat investasi karena itu salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan factor produksi yang sangat dominan penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output.

3. Teknologi

Penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi jika hanya dilihat dari peningkatan output.dengan penggunaan

teknologi manusia dapat memanfaatkan cara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya.

4. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar, system manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna di banding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi.

5. Kewirausahaan

Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil resiko guna memperoleh keuntungan.

6. Informasi

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang.

2.1.6 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita (2014), mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

a. Ketidak Seimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas

menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah

strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat Penyebaran dan Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolaha
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Bangunan dan Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- 9) Jasa-jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 4) Pembentukan stok
- 5) Ekspor netto (ekspor dikurang impor).

c. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini terangkum dalam tabel.

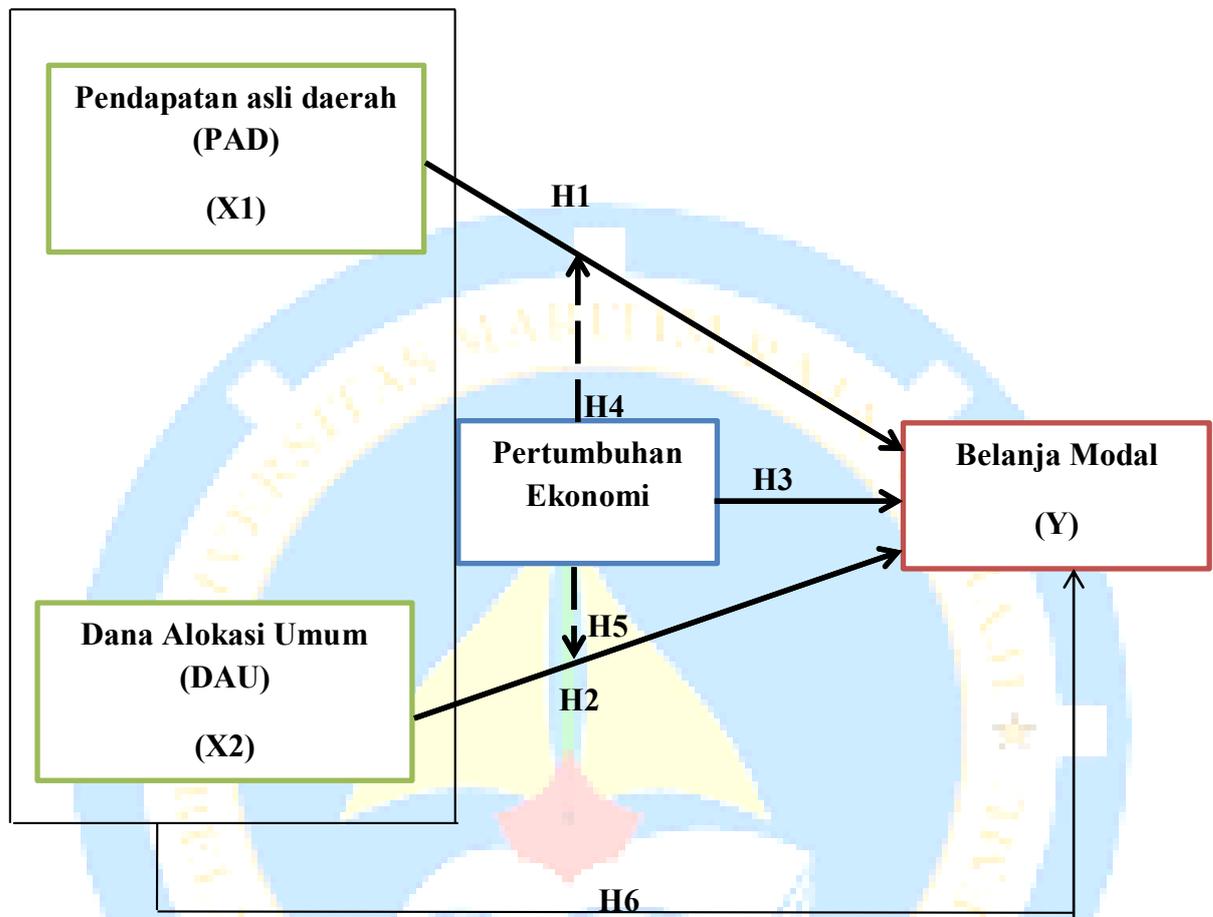
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Ni Putu Dwi Eka Rini, et al.	Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	1. Variabel independent X ₁ :PAD X ₂ :DAU, X ₃ :SILPA. Z : Pertumbuhan Ekonomi 2. Variabel dependent: Y:Belanja Modal	PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal
2	Novianto, Rico. Rafiudin Hanafiah.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.	1. variabel independent: X ₁ :PAD X ₂ :Dana Perimbangan X ₃ :Kinerjja Keuangan 2. variabel dependent: Y: Belanja Modal	PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
3	Putu Candra Gunantara dan A.A.N.B Dwirandra (2014)	Pengaruh PAD dan DAU pada Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi	1. variabel independen: X ₁ :PAD X ₂ :DAU 2. variabel dependen : Y: Pertumbuhan Ekonomi 3. variabel moderasi : Z: Belanja modal	PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

4	Adyatma, E (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi,	1. variabel independen: X ₁ :PAD X ₂ :DAU 2. Variabel dependen: Y:Belanja Modal 3. variabel moderasi: Z: Pertumbuhan ekonomi	PAD tidak berpengaruh terhadap BM, DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap BM, PE tidak berpengaruh terhadap BM. PE tidak memoderasi hubungan PAD dengan BM PE tidak memoderasi hubungan DAU dengan BM.
5	Sugiarti dan Supadmi (2014)	Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	1. variabel independen: X ₁ :PAD X ₂ :DAU X ₃ :SILPA 2. variabel dependen: Y: Belanja Modal 3. variabel moderasi Z: Petumbuhan Ekonomi	PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal.
6	Rudin, M. Amir, A. M. Bakarbesy, M.L.F (2017)	Review of Locally-Generated Revenue and Capital Expenditure in Improving District and Municipalitie's Economy Growth in North Maluku Province	1. independant variabel: x ₁ : Locally Generated x ₂ : Capital Expenditure 2. dependent variabel : Y : Economy Growth	he result of this research reveals that Locally generated Revenue in districts and municipalities in North Maluku gives significant and positive effects on economic growth in Maluku The result of this research shows that capital expenditure gives positive and significant effects on economic growth in districts and municipalities in North Maluku.

Sumber olahan penulis (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Ghozali (2016)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan



: Pengaruh secara langsung



: Pengaruh secara tidak langsung

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka akan mampu membiayai belanja modal di daerahnya. Belanja modal yang tinggi akan mampu membangun sarana prasarana dan infrastruktur yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan pelayanan publik yang lebih merata.

Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui biaya belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Permata 2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil studi yang dilakukan (Heliyanto 2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H1 = Diduga Terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Sumber pendapatan yang penting yang didapatkan daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum,

merupakan transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan desentralisasi. Jika Dana Alokasi Umum tinggi atau meningkat maka akan sangat membantu Belanja Modal di daerahnya karena untuk membangun suatu sarana prasarana publik yang lebih merata dibutuhkan dana yang besar dalam pembangunannya. Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umumnya tinggi maka Belanja Modal juga akan tinggi. (Permatasari 2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H2 = Diduga Terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal

2.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB. Pertumbuhan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mendorong terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana suatu pertumbuhan ekonomi memiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah akan semakin leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. (Sugiarthi dan Supadmi 2014)

H3 = Diduga Terdapat Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal.

2.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Jika pembangunan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga mempengaruhi alokasi belanja modal karena sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap Belanja Modal. (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat

memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal.

H4 = Diduga Terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating.

2.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal. Semakin tinggi transfer dari pusat untuk daerah dapat membantu daerah dalam belanja modal nya, dana transfer dari pusat dapat dioptimalkan dengan efektif dan efisien supaya tidak diserap kembali oleh pusat. Dengan adanya transfer yang cukup diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik maksimal yang salah satunya direalisasikan melalui belanja modal. Akibatnya, dalam hal alokasi belanja modal diharapkan optimal maka harus diikuti dengan dana transfer berupa Dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang maksimal pula.

Penelitian mengenai hubungan antara Dana alokasi umum dengan belanja modal dilakukan oleh Mirta pikasari (2015) yang menyimpulkan bahwa Dana aloaksi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini dikarenakan bahwa Dana alokasi umum merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di daerahnya sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Putu Chandra Gunantara (2014).

H5 = Diduga Terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating.

2.5.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderating dalam Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan

Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah dan belanja daerahnya tinggi maka akan menyebabkan peningkatan pada capaian pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hasil moderasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah mampu menaikkan Belanja Modal, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat propinsi kepri. Dana Alokasi Umum yang sangat fleksibel dalam pembuatannya dapat mengalokasikan danaya guna pelayanan publik yang lebih merata

Jika didukung dengan Belanja Modal berarti pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih meningkat. hasil penelitian ini menunjukkan hal yang demikian, berarti bahwa dalam kenyataannya dana yang berasal dari daerah (PAD) digunakan oleh pemerintah daerah belanja keperluan daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah didukung dengan Belanja Modal yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum yang sangat fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya yang antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal. Jika dilihat dari

arah antara Dana alokasi umum dengan Pertumbuhan ekonomi moderasi terhadap daerah mempunyai hubungan yang positif penelitian ini mendukung hasil penelitian penelitian

H6 : Diduga Terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating.

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

H2 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

H3: Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

H4 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

H5 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

H6 : Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Penelitian dilakukan pada laporan Keuangan daerah dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Biro Pusat Statistik (BPS).

3.2 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau cara cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), yang mana memusatkan perhatian pada gejala gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakanya sebagai variabel. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen pada hipotesis penelitian.

3.3 Variabel Operasional Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38) definisi variabel penelitian adalah “Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”

Tabel 3.1 Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Belanja Modal (Y) Utang (2015)	Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.(Utang, 2015)	Belanja Modal = [Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya] <i>Sumber: Utang (2015)</i>	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X1) Kuncoro (2014)	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .(Kuncoro,2014)	Pendapatan Asli Daerah = [Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah] <i>Sumber : Kincoro (2014)</i>	Rasio
Dana Alokasi Umum (X2) Halim (2016)	Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk rnenbiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.(Halim 2016)	Dana Alokasi Umum = [Alokasi Dasar + Celah Fiskal] Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – KapasitasFiskal <i>Sumber : Halim (2016)</i>	Rasio
Pertumbuhan ekonomi (Y) Rahardjo (2013)	Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Rahardjo 2013).	Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{(PDRB_t - PDRB_{(t-1)})}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ <i>Sumber : Adisasmita (2013)</i>	Rasio

3.4 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80) mengungkapkan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari Kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013-2017 sebanyak 35. Sugiyono (2016:81) mengungkapkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Full Sampling yang penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono 2016: 85). Adapun Sampel dalam penelitian seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota dengan rentang waktu pengamatan dari tahun anggaran 2013 2017.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kota Tanjungpinang
2.	Kota Batam
3.	Kabupaten Karimun
4.	Kabupaten Bintan
5.	Kabupaten Natuna
6.	Kabupaten Lingga
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : dpjk. Kemenkeu.go.id

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, mengunduh dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Selain data

sekunder yang berasal dari dokumen, data dalam penelitian ini juga diambil melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis, literatur, jurnal, artikel, website dan pengetahuan yang dianggap relevan dengan pembahasan.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi Sugiyono (2016:147). Alat analisis yang digunakan untuk rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik tersebut dilakukan dengan program SPSS.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendekati apakah residual data berdistribusi normal atau tidak, yaitu melihat grafik normal probability plot dan uji statistik. Apabila pada grafik normal

probability plot tampak bahwa titik titik menyebar berhimpit diatas garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disampaikan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memiliki asumsi klasik normalitas. Selain itu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non- paramatik *kolmogrov-sminov* (K-S). Apabila nilai signifikansi > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal Ghozali (2016:154).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara umum yang digunakan peneliti untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas pada model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Influence Factor*). Untuk untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai $VIF > 10$ atau jika $Tolerance < 0.10$, maka menunjukkan adanya multikolonieritas dalam model regresi.
2. Jika nilai $VIF < 10$ atau jika $Tolerance > 0.10$, maka menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas dalam model regresi Ghozali (2016:103).

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107), jika autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, yaitu melalui uji Durbin Watson (DW test). Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari d_{lower} atau lebih besar dari $(4-d_u)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak diantara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak diantara d_l dan d_u diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dengan dilakukan beberapa metode pengujian yang baik digunakan diantaranya *Speaman's rho*, uji *Glejser* dan melihat pola grafik plot. Namun, dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat *Speaman's rho*, jika tingkat signifikan berada diatas 5% (0,05) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika berada dibawah 5% (0,05) terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Analisis Regresi Moderating

Tujuan uji ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model pengujian regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Uji moderating yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*, berbeda dengan analisis sub kelompok karena menggunakan pendekatan analisis yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator, Ghozali (2016:219).

Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Persamaan moderating yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 PE + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 PE + \beta_4 PAD * PE + \beta_5 DAU * PE + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁ : Pendapatan asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

Z : Pertumbuhan Ekonomi

X₁*Z : Pendapatan Asli Daerah*Pertumbuhan Ekonomi

X₂*Z : Dana Alokasi Umum* Pertumbuhan Ekonomi

e : *error*

Untuk melihat apakah variabel moderating mampu memperkuat atau memperlengah pengaruh variabel independen terhadap dependen yaitu dengan melihat beta yang dihasilkan dari interaksi variabel independen dan moderating. Sedangkan tabel signifikan untuk melihat apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

3.6.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating akan menggunakan:

3.6.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji –t)

Menurut Ghozali (2016:97) bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara

individual dalam menerangkan variabel variabel dependen. Kriteria signifikansi parameter individual (uji statistik t) adalah:

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

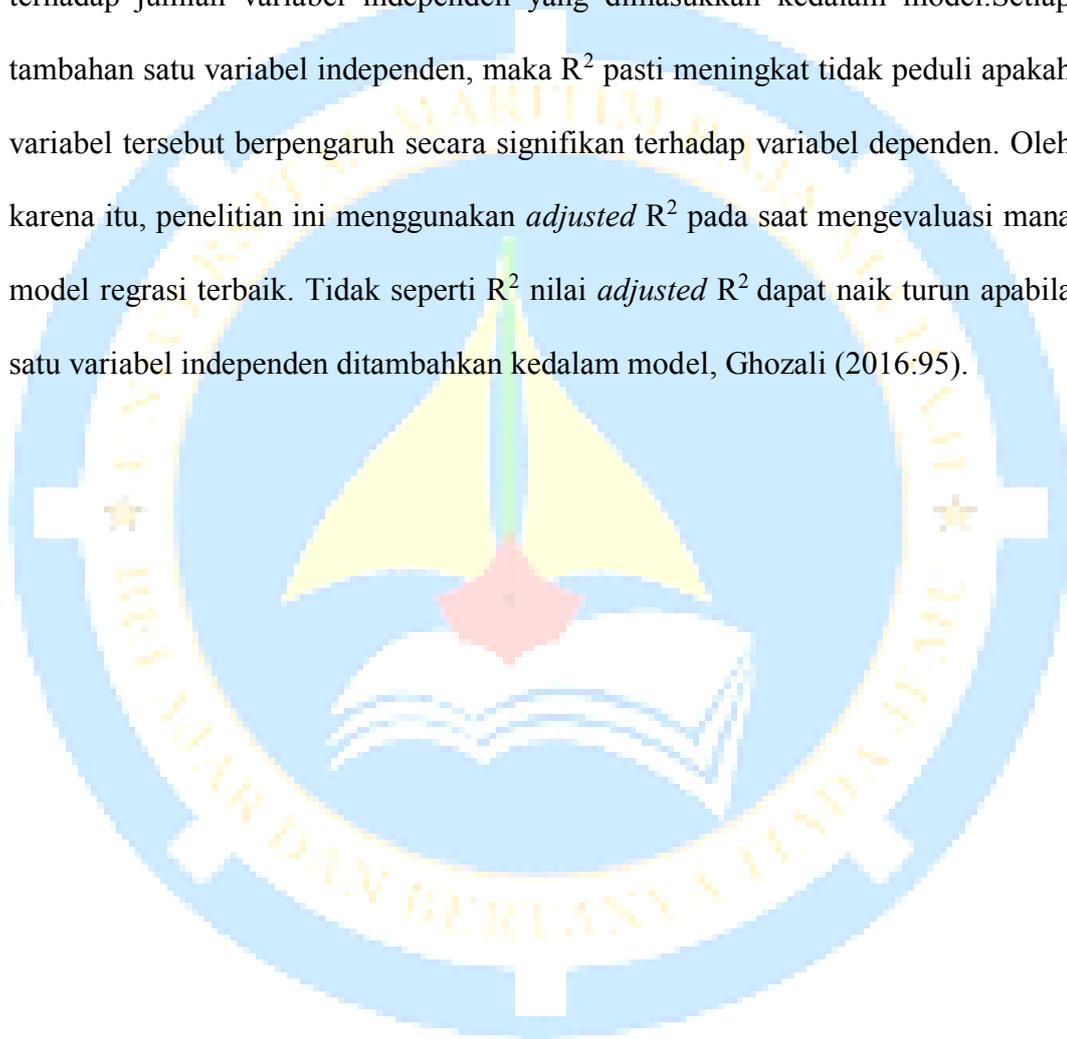
Uji statistik F mengukur goodness of fit, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemanapun model dalam menerangkan variabel variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 nilai *adjusted R²* dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model, Ghozali (2016:95).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis Observasi

Objek penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013-2017. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dalam situs www.kemenkeu.go.id tahun 2013-2017. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik Full sampling dimana sampel dipilih secara keseluruhan. maka sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 35.

Tabel 4.1 Objek Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kota Tanjungpinang
2.	Kota Batam
3.	Kabupaten Karimun
4.	Kabupaten Bintan
5.	Kabupaten Natuna
6.	Kabupaten Lingga
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : *dpjk. Kemenkeu.go.id*

4.2 Hasil Analisis Data

4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kondisi realisasi dalam analisis. Sttistik deskriptif memberikan penjelasan tentang nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel dependen. Sugiyono (2016:147)

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA MODAL	35	66088163421	556926371276	234069989155,54	123916299974,772
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35	206292379	2215680286682	290234513323,60	500206962273,775
DANA ALOKASI UMUM	35	448692800	599103958000	345914318794,29	129496876778,314
PERTUMBUHAN EKONOMI	35	-10	778	485,40	190,975
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 22.

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

Tabel 4.2 menjelaskan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 yang dapat dilihat dari N. Serta nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut :

1. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 66.088.163.421 yang di peroleh Kota Tanjungpinang tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 556.926.371.276 yang diperoleh Kota Batam tahun 2017, nilai mean sebesar 234.069.989.155,5 dan nilai standar deviasi sebesar 123.916.299.974,772
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 206.292.379 yang diperoleh Kabupaten Bintan untuk Tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 2.215.680.286.682 yang diperoleh Kota Batam untuk tahun 2016, nilai mean sebesar 290234513323,60 dan standar deviasi sebesar 500206962273,775.
3. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 448.692.800 yang diperoleh Kota Tanjungpinang tahun 2017, nilai maksimum sebesar

599.103.958.000 yang diperoleh Kota Batam untuk tahun 2014, nilai mean sebesar 21888967276,649 dan standar deviasi sebesar 129496876778,314.

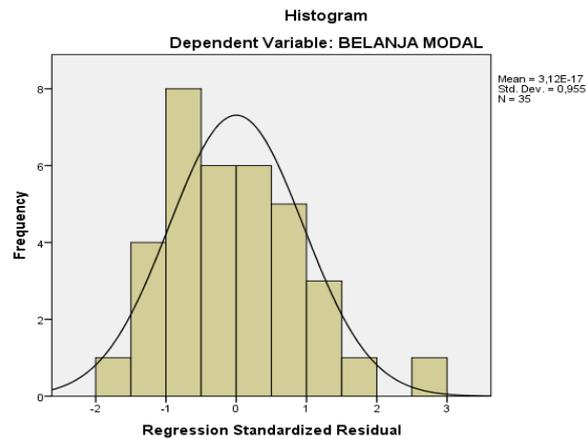
4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar -10 yang diperoleh Kabupaten Anambas untuk tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 7.78 yang diperoleh Kota Tanjungpinang untuk tahun 2013, nilai mean sebesar 485,40 dan nilai standar deviasi sebesar 190,975.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

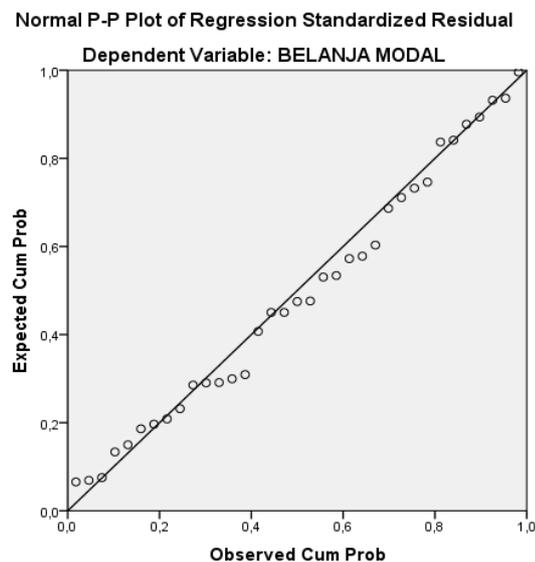
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendekati apakah residual data berdistribusi normal atau tidak, yaitu melihat grafik normal probability plot dan uji statistik.

Apabila pada grafik normal probability plot tampak bahwa titik titik menyebar berhimpit di atas garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disampaikan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memiliki asumsi klasik normalitas. Ghazali (2016:154).



Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Gambar 4.1
Hasil Grafik Histogram



Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Gambar 4.2
Hasil Grafik P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 di atas, pada grafik histogram terlihat seperti pola terdistribusi normal. Namun kesimpulan dengan grafik histogram ini belum dapat dipastikan kenormalan datanya untuk jumlah yang

kecil. Begitu juga pada grafik P-plot ini juga masih belum dipastikan kenormalanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti dan meyakinkan dilakukan uji statistik non parametrik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi diatas 0,05 (>0.05), maka data terdistribusi dengan normal. Ada dua cara untuk melihat residual berdistribusi normal taua tidak adalah dengan melihat analisis grafik (*histogram dan probability plot*) dan analisis uji *one sample Kolmogorof-Smirnov*. Maka dilakukan kembali uji statistik yaitu uji *one sample Kolmogorof-Smirnov*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000013
	Std. Deviation	92065053970,4
Most Extreme Differences	Absolute	5337000
	Positive	,099
	Negative	-,057
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22.

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi (*asypm.sig*) sebesar 0,2. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain model regresi yang digunakan memenuhi asumsi Normalitas.

4.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Ghozali (2016:103). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian sebagai berikut: Jika nilai VIF >10 atau jika Tolerance <0.10, maka menunjukkan adanya multikolonieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF <10 atau jika Tolerance > 0.10, maka menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas dalam model regresi

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	121736495 374,422	601232343 79,262		2,025	,052		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	,144	,049	,478	2,967	,006	,686	1,457
DANA ALOKASI UMUM	,267	,157	,279	1,698	,099	,661	1,514
PERTUMBUHAN EKONOMI	- 30222503, 373	88655187,4 13	-,047	-,341	,735	,954	1,048

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perhitungan menunjukkan nilai tolerance 0,686 (PAD), 0,661(DAU) 0,954 (PE) dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF <10 1,457 (PAD), 1,514

(DAU) 1,048 (PE). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) Menurut Ghozali (2016:107). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Model regrasi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi. Salah satu cara yan dapat digunakan untuk mendekteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, yaitu mellui uji Durbin Watson (DW test). Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut: Jika d lebih kecil dari d_{latau} lebih besar dari $(4-d_u)$, maka hipotsis nol ditolak, yang berarti terdapat aukorelasi. Jika d terletak diantara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika d terletak diantara d_l dan d_u diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,669 ^a	,448	,395	96416957671,892	2,411

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

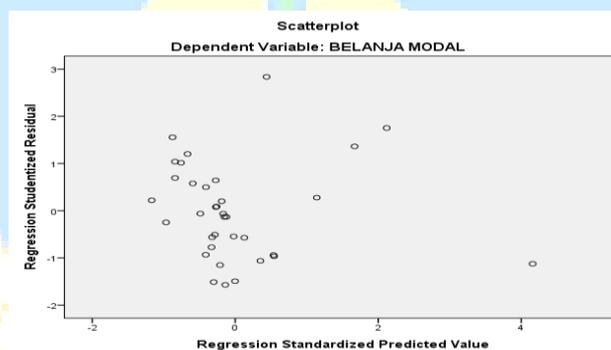
Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan pengujian autokorlasi pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai DW sebesar 2,411. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson . dari tabel statistik DW didapat nilai d_L sebesar 1,2833 dan d_U sebesar 1,6283 dengan

jumlah variabel independen ($K=3$) dan jumlah sampel ($N=35$). Oleh karena itu nilai DW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari 1.7167 ($3-dU$) atau $dU < DW < 4-dU$ ($1,2833 < 2,411 > 1.7167$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, positif atau negatif, sehingga data terbebas dari autokorelasi.

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari menggunakan grafik *Scatterplot* yaitu seperti gambar dibawah ini :



Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan *Scatter Plot*

Dari grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan dilakukan beberapa metode pengujian yang baik digunakan diantaranya *Speaman's rho*, uji *Glejser* dan melihat pola garafik plot. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat *Speaman's rho*, jika tingkat signifikan berada diatas 5% (0,05) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika berada dibawah 5% (0,05) terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas (menggunakan Uji Rank Spaerman's rho)

		Correlations				
		BELANJA MODAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA ALOKASI UMUM	PERTUMBUHAN EKONOMI	Unstandardized Residual
BELANJA MODAL	Correlation Coefficient	1,000	,235	,190	,012	,831**
	Sig. (2-tailed)	.	,175	,274	,944	,000
	N	35	35	35	35	35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Correlation Coefficient	,235	1,000	,407*	,294	-,051
	Sig. (2-tailed)	,175	.	,015	,086	,772
	N	35	35	35	35	35
DANA ALOKASI UMUM	Correlation Coefficient	,190	,407*	1,000	,201	-,178
	Sig. (2-tailed)	,274	,015	.	,246	,305
	N	35	35	35	35	35
PERTUMBUHAN EKONOMI	Correlation Coefficient	,012	,294	,201	1,000	-,055
	Sig. (2-tailed)	,944	,086	,246	.	,754
	N	35	35	35	35	35
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,831**	-,051	-,178	-,055	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,772	,305	,754	.
	N	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikan PAD sebesar 0,772 DAU sebesar 0,305 dan PE sebesar 0,754. Karena nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini dianalisis dengan model regresi moderating untuk melihat seberapa jauh besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap dependen dengan model dasar sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{PE} + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁ : Pendapatan asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

Z : Pertumbuhan Ekonomi

e : *error*

Tabel 4.7 Uji Regresi Moderasi Tahap I

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	121736495 374,422	601232343 79,262		2,025	,052		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	,144	,049	,478	2,967	,006	,686	1,457
DANA ALOKASI UMUM	,267	,157	,279	1,698	,099	,661	1,514
PERTUMBUHAN EKONOMI	- 30222503,3 73	88655187,4 13	-,047	-,341	,735	,954	1,048

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $\text{Belanja Modal} = 1217356495 + 0,144 \text{ PAD} + 0,267 \text{ DAU} + 30222503,373 \text{ PE} + e$.

Keterangan :

1. Nilai konstanta (n) sebesar 127356495374,422 menunjukkan bahwa nilai PAD, DAU dan PE bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai dependent Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 -2017 memiliki nilai sebesar 1217356495374,422.
2. Nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,141, jika PAD mengalami peningkatan 1 satuan maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 0,141 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan dan sebaliknya jika variabel PAD mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel DAU, PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar 0,141.
3. Nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar 0,267, jika DAU mengalami peningkatan 1 satuan maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 0,267 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan dan sebaliknya jika variabel DAU mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar 0,267.
4. Nilai koefisien regresi variabel PE sebesar -30222503,373 jika PE mengalami peningkatan 1 satuan maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar -30222503,373 dengan asumsi bahwa variabel bebas

lainya tetap/dianggap konstan dan sebaliknya jika variabel PE mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, DAU tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar -30222503,373

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{PE} + \beta_4 \text{PAD} * \text{PE} + \beta_5 \text{DAU} * \text{PE} + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁ : Pendapatan asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

Z : Pertumbuhan Ekonomi

X₁*Z : Pendapatan Asli Daerah* Pertumbuhan Ekonomi

X₂*Z : Dana Alokasi Umum* Pertumbuhan Ekonomi

e : error

Tabel 4.8 Analisis Regresi tahap II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38898519244 5,968	13277470049 1,911		2,930	,007
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	,518	,214	1,713	2,419	,022
	DANA ALOKASI UMUM	-,707	,421	-,739	-1,680	,104
	PERTUMBUHAN EKONOMI	- 662179905,58 7	300459994,95 4	-1,021	-2,204	,036
	PAD_PE	-,001	,000	-1,373	-1,846	,075
	DAU_PE	,002	,001	1,843	2,447	,021

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas persamaan analisis regresi moderasi adalah sebagai berikut : $\text{Belanja Modal} = 388985192445,968 + 0,518 \text{ PAD} + -0,707 \text{ DAU} + \text{PE} + -662179905,580 + -001 \text{ PAD_PE} + 0,002 \text{ DAU_PE} + e.$

Keterangan :

1. Nilai koefisien (n) sebesar 388985192445,968 menunjukkan bahwa nilai PAD, DAU dan PE, maka nilai PAD yang dimoderasi menggunakan PE dan DAU yang dimoderasi menggunakan PE terhadap nilai dependent Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 -2017 memiliki nilai yang dianggap konstan sebesar 388985192445,968
2. Nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,518 hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 satuan maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 0,518 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan sebaliknya jika variabel PAD mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel DAU, PAD_PE, DAU_PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar 0,518
3. Nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar -0,707 hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 satuan maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar -0,707 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan sebaliknya jika variabel DAU mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, PAD_PE, DAU_PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar -0,707.
4. Nilai koefisien regresi variabel PE sebesar 662179905,580 hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi

mengalami peningkatan sebesar 662179905,580 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan sebaliknya jika variabel PE mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, DAU, PAD_PE, DAU_PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar 662179905,580

5. Nilai koefisien regresi variabel PAD dimoderasi PE sebesar -0,001, hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 satuan Pendapatan Asli Daerah dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi maka akan menurunkan nilai Belanja Modal sebesar -0,001 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan sebaliknya jika variabel PAD_PE mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, DAU, DAU_PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan turun sebesar 0,000.
6. Nilai koefisien regresi variabel DAU dimoderasi PE sebesar 0,002. hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 satuan Pendapatan Asli Daerah dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi maka akan menurunkan nilai Belanja Modal sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/dianggap konstan sebaliknya jika variabel DAU_PE mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi variabel PAD, DAU, PAD_PE tetap atau tidak berubah maka belanja modal akan naik sebesar - 0,002.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating akan menggunakan:

4.5.1 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji -t)

Tabel 4.9 Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3889851924 45,968	1327747004 91,911		2,930	,007
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	,518	,214	1,713	2,419	,022
	DANA ALOKASI UMUM	-,707	,421	-,739	-1,680	,104
	PERTUMBUHAN EKONOMI	- 662179905,5 87	300459994,9 54	-1,021	-2,204	,036
	PAD_PE	-,001	,000	-1,373	-1,846	,075
	DAU_PE	,002	,001	1,843	2,447	,021

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Variabel PAD memiliki sig 0,022 dan nilai t_{hitung} 2,419. Ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 ($> 0,05$). Dan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($t_{tabel} \alpha = 0,05, df = 35-3-1$) di dapatkan perbandingan t_{hitung} 2,419 lebih besar dari t_{tabel} 1,69552 ($2,419 > 1,69552$). Maka hal ini H_a diterima, H_o ditolak sehingga PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.
2. Variabel DAU memiliki sig 0.104, dan nilai t_{hitung} -1,680. Ini berarti nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($< 0,05$). Dan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($t_{tabel} \alpha = 0,05, df = 35-3-1$) di dapatkan perbandingan t_{hitung} -1,680 lebih kecil dari t_{tabel} 1,69552 ($-1,680 < -1,69552$). Maka hal ini H_a ditolak H_o diterima sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.

3. Variabel PE memiliki sig 0,036 dan nilai t_{hitung} -2,204. Ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ($> 0,05$). Dan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($t_{tabel} \alpha = 0,05, df = 35-3-1$) di dapatkan perbandingan t_{hitung} -2,204 lebih besar dari t_{tabel} 169552 (-2,204 $>$ -1,69552). Maka hal ini H_a diterima H_o ditolak sehingga PE berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.
4. Variabel PAD_PE memiliki sig 0,075 dan nilai t_{hitung} -1,846 ini berarti nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan 0,05 ($>0,05$). Dan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($t_{tabel} \alpha = 0,05, df = 35-3-1$) di dapatkan perbandingan t_{hitung} -1,846 lebih besar dari t_{tabel} 169552 (-1,846 $>$ -169552). Maka hal ini H_a diterima dan H_o ditolak sehingga Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi PAD terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.
5. Variabel DAU_PE memiliki sig 0,021 dan nilai t_{hitung} 2,447, ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ($>0,05$). Dan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($t_{tabel} \alpha = 0,05, df = 35-3-1$) di dapatkan perbandingan t_{hitung} 2,447 lebih besar dari t_{tabel} 169552 (2,447 $>$ 169552). Maka hal ini H_a diterima dan H_o ditolak sehingga Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi DAU terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.

4.5.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.13 Uji F Tahap I

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2338953580530	3	7796511935102	8,387	,000 ^b
		76240000000,000		5400000000,000		
	Residual	2881831215278	31	9296229726703		
		04770000000,000		380000000,000		
	Total	5220784795808	34			
		81000000000,000				

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai sig 0,00 lebih < dari taraf signifikansi 5% (0.05), dan berdasarkan perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} ($F_{tabel} \alpha=0,05, df=35-3-1=31$). Di dapat f_{hitung} sebesar 8,387 lebih besar dari f_{tabel} 2,91 ($8,387 > 291$), maka dalam hal ini H_a diterima dan H_o ditolak yang menunjukkan bahwa PAD,DAU dan PE secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.

Tabel 4.14 Uji F Tahap II

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2842094071772	5	5684188143545	6,930	,000 ^b
		57530000000,000		1510000000,000		
	Residual	2378690724036	29	8202381807021		
		23470000000,000		499000000,000		
	Total	5220784795808	34			
		81000000000,000				

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU_PE, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD_PE

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai sig 0,00 < dari taraf signifikansi sebesar 5 % (0,05), dan berdasarkan perbandingan f_{hitung} dan f_{tabel} ($F_{tabel} \alpha=0,05, df=35-3-1=31$), di dapat f_{hitung} 6,930 lebih besar dari f_{tabel} 2,91 (6,90 > 291), maka dalam hal ini H_a diterima dan H_o ditolak yang menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.

4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemanapun model dalam menerangkan variabel variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.

Tabel 4.15 Uji Koefisien Dererminasi Tahap I

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,669 ^a	,448	,395	96416957671,892	2,411

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,395 yang berarti 395% kemampuan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) serta variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal sebesar 395% sedangkan sisanya ($100\% - 395\% = -2.95\%$) di pengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi Tahap II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,738 ^a	,544	,466	90567001755,725	2,191

a. Predictors: (Constant), DAU_PE, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD_PE

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Output Data Olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,466 yang berarti 466% kemampuan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum), variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi) setelah dimoderasi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sebesar 466% sedangkan sisanya ($100\% - 466\% = -3.66\%$) dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.6 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 2,930 dengan nilai signifikan 0,022 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan

daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki.

Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja modal. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dengan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Hasil analisis Uji t menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-1,680$ dan nilai t_{tabel} sebesar $1,69552$ sedangkan, sig $0,104$ ($> 0,05$) yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.

Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam prakteknya dimanfaatkan

untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Sedangkan fungsi adanya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyanto (2016) hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian di daatkan bahwa Pengujian menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh dengan koefesien negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $-2,204 >$ dari t_{tabel} sebesar $1,69552$ dan tingkat signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini menunjukkan kalau Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ummu Khoiriah, 2015).

4.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat diketahui nilai Beta sebesar $-0,001$ dengan t_{hitung} sebesar -1.846 dan nilai signifikan $0,075$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sarasanya program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Program pemerintah daerah yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau akan tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan (Jaya dan Dwirandra 2014) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal.

4.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat diketahui nilai beta 0,002 t_{hitung} sebesar 2.447 dengan nilai signifikan 0,021 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

4.6.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 6,930 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya Belanja Modal yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum mampu memberikan gambaran yang cukup bahwa pemerintah daerah mampu bertanggung jawab sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah dalam hal mengelola sumber keuangan yang diperoleh untuk tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian mendukung penelitian dari (Permatasari 2015) menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian peneliti yakni :

1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dengan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017, karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah dll.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dengan koefisien negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada pembangunan daerah, apabila suatu ekonomi di daerah meningkat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating berpengaruh dengan koefisien negatif dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sehingga memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating berpengaruh positif dan signifikan dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sehingga memperkuat hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017.
6. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2017, karena Dana Alokasi Umum sebagai equalization grant yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah disarankan kita sesorang yang membayar wajib pajak untuk membantu pendapatan asli daerah agar dapat membangun sarana publik yang lebih memadai.
2. Untuk meningkatkan Dana Alokasi Umum disarankan untuk tidak menyalah gunakan dana dari pusat untuk belanja lain seperti belanja pegawai, belanja hibah dll.
3. Untuk membantu pertumbuhan ekonomi disarankan dengan memakai produk sendiri dan lebih memajukan produk dalam negeri.

4. Saran disini ialah untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain lain yang sah sehingga apabila Pendapatan meningkat maka Belanja Modal akan terlaksana.
5. Saran disini pemerintah daerah untuk membantu daerah yang lebih membutuhkan dana dari pusat seperti di perdesaaan yang alternatifnya kurang memadai. Maka akan meningkatkan daerah tersebut.
6. Saran disini agar kita seorang insan agar tidak menunda nunda membayar apa yang harus/wajib dibayar, karena akan berdampak pada proses pembangunan daerah setempat yang akan membantu daerah yang akan berdampak pada negara.
7. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan memperluas kabupaten dan kota yang akan diteliti sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan lebih baik.
8. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lainnya yang akan digunakan sebagai variabel moderasi yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2016.
- Adisasmita, Rahardjo 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adyatma, E (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(2): 190-205 ISSN: 1979-4878.
- Amir, Rudin, 2017. Review of Locally -Generated Revenue and Capital Expenditure in Improving District and Municipalities' Economy Growth in North Maluku Province : *Russian Journal of Agricultural & Socio-Economic Sciences*; Aug2017, Vol. 68 Issue 8, p209-216, 8p
- Apriyanto, Jati Dwi. 2016. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah periode 2013-2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*, Penerbit UPP STIM YKPN
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunantara, Putu Candra & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 (2014): 529- 546, ISSN: 2302-8556
- Hasdi. 2015. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat
- Heliyanto, Firnandi. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya. <https://www.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik
- Jaya, I P.N. Panji Kartika dan A.N.B. Dwiantra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (1), 79-92.

- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era baru Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Machmud Amir 2016, *Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ni Putu Dwi Eka Rini, et al. 2014. Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7, No. 2, Mei: 1- 7
- Nuraini, I. 2017. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Novianto, Rico. Rafiudin Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi*. ISSN: 2302-7169 Vol.4 No.1, 4-8.
- Permatasari, Isti. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. 2014. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Rosidin, Utang 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Tim Redaksi Pustaka Setia..
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke -23 ALFABETA CV. Bandung
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi" 32 (2), 477-95.
- Susanto, Edy dan Marhamah. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur). *JURNAL STIE SEMARANG*, VOL 8, NO 1, Edisi Februari 2016 (ISSN : 2252-826).
- Ummu Khoiriah. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Anggaran Belanja

Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.

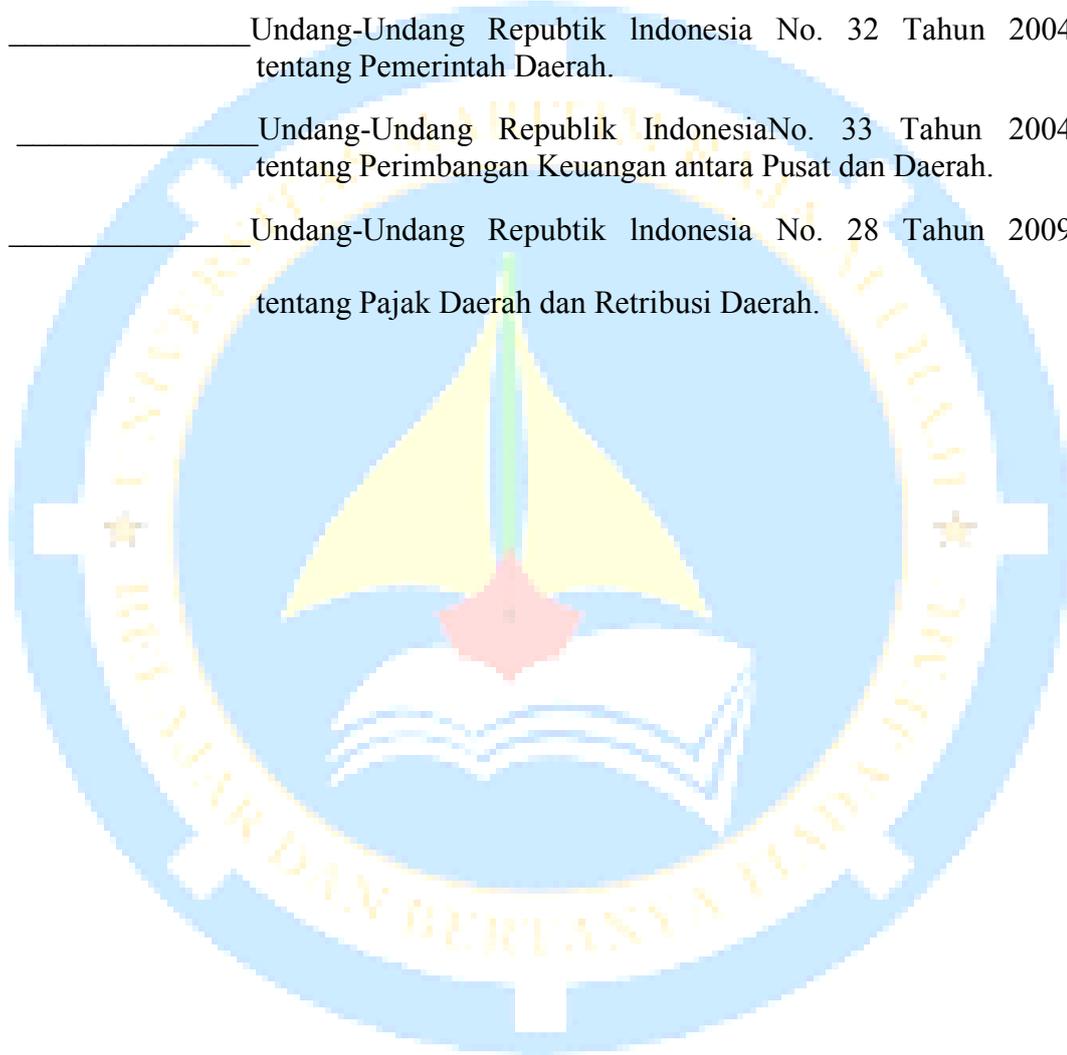
www.djpk.kemenkeu.go.id dan bps.go.id/Kepri Tahun 2020

Yudiaatmaja, Fridayana.,Ni Made Nopiani dan Wayan Cipta. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Buleleng. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



LAMPIRAN

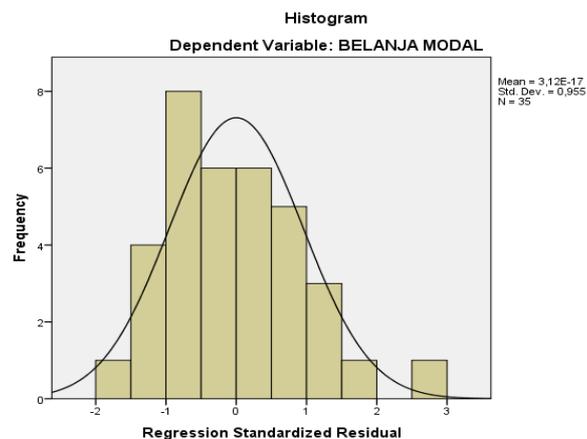
KABUPATEN/ KOTA	TAHU N	BELANJA MODAL (Rp)	PAD (Rp)	DAU (Rp)	PE %
Tanjungpinang	2013	135.856.480.015	105.583.015.267	348.778.489.000	7.78
Batam		353.874.638.873	606.339.970.377	528.839.827.000	7.18
Bintan		246.972.619.382	136.547.923.794	288.685.934.000	6.08
Lingga		238.465.501.420	29.526.149.630	298.552.154.000	6.88
Natuna		305.094.583.315	41.890.798.510	177.949.262.000	4.60
Karimun		209.306.684.774	272.557.903.989	306.219.557.000	7.09
Anambas		290.859.609.342	31.123.666.112	233.124.880.000	3.18
Tanjungpinang	2014	214.019.248.113	125.170.740.485	360.587.451.000	5.28
Batam		492.741.683.751	779.944.837.451	599.103.958.000	7.16
Bintan		218.846.551.365	190.843.040.464	304.974.241.000	6.35
Lingga		187.806.283.718	21.010.343.891	316.390.446.000	5.16
Natuna		260.615.103.948	39.404.360.299	187.950.770.000	4.42
Karimun		181.601.652.409	310.386.467.101	324.170.518.000	6.87
Anambas		265.937.559.909	21.489.586.793	215.651.064.000	3.70
Tanjungpinang	2015	66.088.163.421	122.893.490.241	325.258.855.000	5.69
Batam		524.332.531.768	1.936.406.807.58	529.988.410.000	6.83
Bintan		162.433.674.198	186.630.240.775	290.035.577.000	5.16
Lingga		113.734.339.276	20.305.789.397	308.643.756.000	2.38
Natuna		131.189.083.723	35.211.059.623	145.433.895.000	3.90
Karimun		95.283.788.046	360.641.751.643	299.313.329.000	6.54
Anambas		228.094.718.046	17.218.368.878	184.263.823.000	3.03
Tanjungpinang	2016	191.350.111.286	126.045.740.738	449.786.399.000	5.08
Batam		524.463.723.680	2.215.680.286.682	576.930.711.000	5.45
Bintan		211.736.794.098	206.292.379.	449.835.609.000	5.96
Lingga		76.950.161.467	21.017.262.805	412.649.320.000	4.07
Natuna		220.699.518.549	53.414.566.344	345.284.029.000	3.01
Karimun		163.292.772.968	397.442.616.167	385.437.488.000	6.18
Anambas		271.139.541.287	34.180.165.616	350.512.758.000	2.91
Tanjungpinang	2017	154.761.518.954	161.711.370.616	448.692.800.000	2.66
Batam		556.926.371.276	974.124.203.684	577.144.597.000	2.19
Bintan		154.191.110.789	43.788.185.056	352.853.435.000	4.94
Lingga		109.462.096.698	22.146.867.684	411.786.116.000	6.08
Natuna		196.100.353.722	391.618.720.928	385.334.087.000	0.87
Karimun		237.328.152.378	68.704.602.095	385.334.087.000	5.33
Anambas		200.892.894.480	257.000.773.232	449.747.633.000	-0.10

Hasil Uji Statistik Desriptif

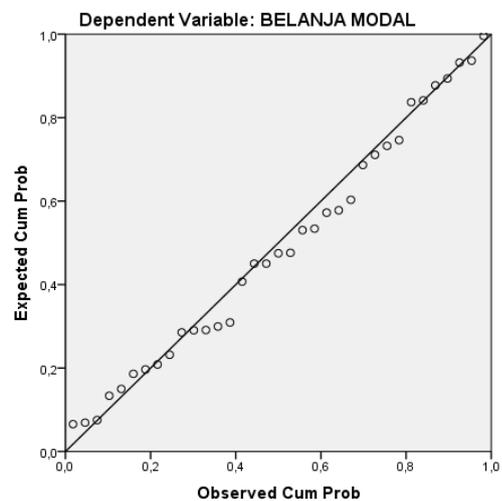
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA MODAL	35	66088163421	556926371276	234069989155,54	123916299974,772
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35	206292379	2215680286682	290234513323,60	500206962273,775
DANA ALOKASI UMUM	35	448692800	599103958000	345914318794,29	129496876778,314
PERTUMBUHAN EKONOMI	35	-10	778	485,40	190,975
Valid N (listwise)	35				

Hasil Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000013
	Std. Deviation	92065053970,45337000
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,057
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolonoeritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	121736495374,422	60123234379,262		2,025	,052		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	,144	,049	,478	2,967	,006	,686	1,457
	DANA ALOKASI UMUM	,267	,157	,279	1,698	,099	,661	1,514
	PERTUMBUHAN EKONOMI	-30222503,373	88655187,413	-,047	-,341	,735	,954	1,048

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Hasil Uji Autokorelasi

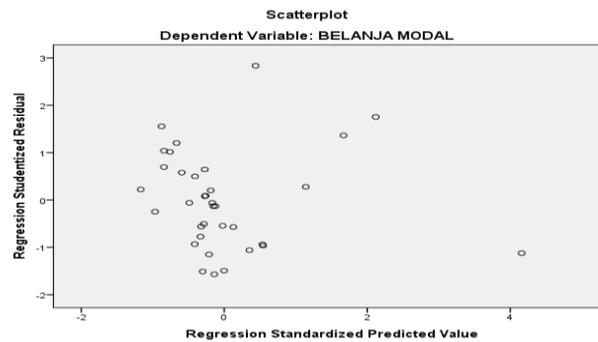
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,669 ^a	,448	,395	96416957671,892	2,411

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Hasil Uji Heterodestisitas



Hasil Uji Rank Spaerman's Rho

Correlations

		BELANJA MODAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA ALOKASI UMUM	PERTUMBUHAN EKONOMI	Unstandardized Residual
BELANJA MODAL	Correlation Coefficient	1,000	,235	,190	,012	,831**
	Sig. (2-tailed)	.	,175	,274	,944	,000
	N	35	35	35	35	35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Correlation Coefficient	,235	1,000	,407*	,294	-,051
	Sig. (2-tailed)	,175	.	,015	,086	,772
	N	35	35	35	35	35
DANA ALOKASI UMUM	Correlation Coefficient	,190	,407*	1,000	,201	-,178
	Sig. (2-tailed)	,274	,015	.	,246	,305
	N	35	35	35	35	35
PERTUMBUHAN EKONOMI	Correlation Coefficient	,012	,294	,201	1,000	-,055
	Sig. (2-tailed)	,944	,086	,246	.	,754
	N	35	35	35	35	35
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,831**	-,051	-,178	-,055	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,772	,305	,754	.
	N	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Regresi Moderasi

Tahap I

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12173649 5374,422	60123234 379,262		2,025	,052		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	,144	,049	,478	2,967	,006	,686	1,457
DANA ALOKASI UMUM	,267	,157	,279	1,698	,099	,661	1,514
PERTUMBUHAN EKONOMI	- 30222503 ,373	88655187 ,413	-,047	-,341	,735	,954	1,048

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

TAHAP II

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3889851924 45,968	1327747004 91,911		2,930	,007
PENDAPATAN ASLI DAERAH	,518	,214	1,713	2,419	,022
DANA ALOKASI UMUM	-,707	,421	-,739	-1,680	,104
PERTUMBUHAN EKONOMI	- 662179905,5 87	300459994,9 54	-1,021	-2,204	,036
PAD_PE	-,001	,000	-1,373	-1,846	,075
DAU_PE	,002	,001	1,843	2,447	,021

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3889851924 45,968	1327747004 91,911		2,930	,007
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	,518	,214	1,713	2,419	,022
	DANA ALOKASI UMUM	-,707	,421	-,739	-1,680	,104
	PERTUMBUHAN EKONOMI	662179905,5 87	300459994,9 54	-1,021	-2,204	,036
	PAD_PE	-,001	,000	-1,373	-1,846	,075
	DAU_PE	,002	,001	1,843	2,447	,021

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Hasil Uji F

Tahap I

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2338953580530 76240000000,0 00	3	7796511935102 5400000000,00 0	8,387	,000 ^b
	Residual	2881831215278 04770000000,0 00	31	9296229726703 380000000,000		
	Total	5220784795808 81000000000,0 00	34			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

Tahap II

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2842094071772 57530000000,0 00	5	5684188143545 1510000000,000	6,930	,000 ^b
	Residual	2378690724036 23470000000,0 00	29	8202381807021 499000000,000		
	Total	5220784795808 81000000000,0 00	34			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU_PE, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD_PE

Hasil Koefesien Determinasi

Tahap I

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,669 ^a	,448	,395	96416957671,892	2,411

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

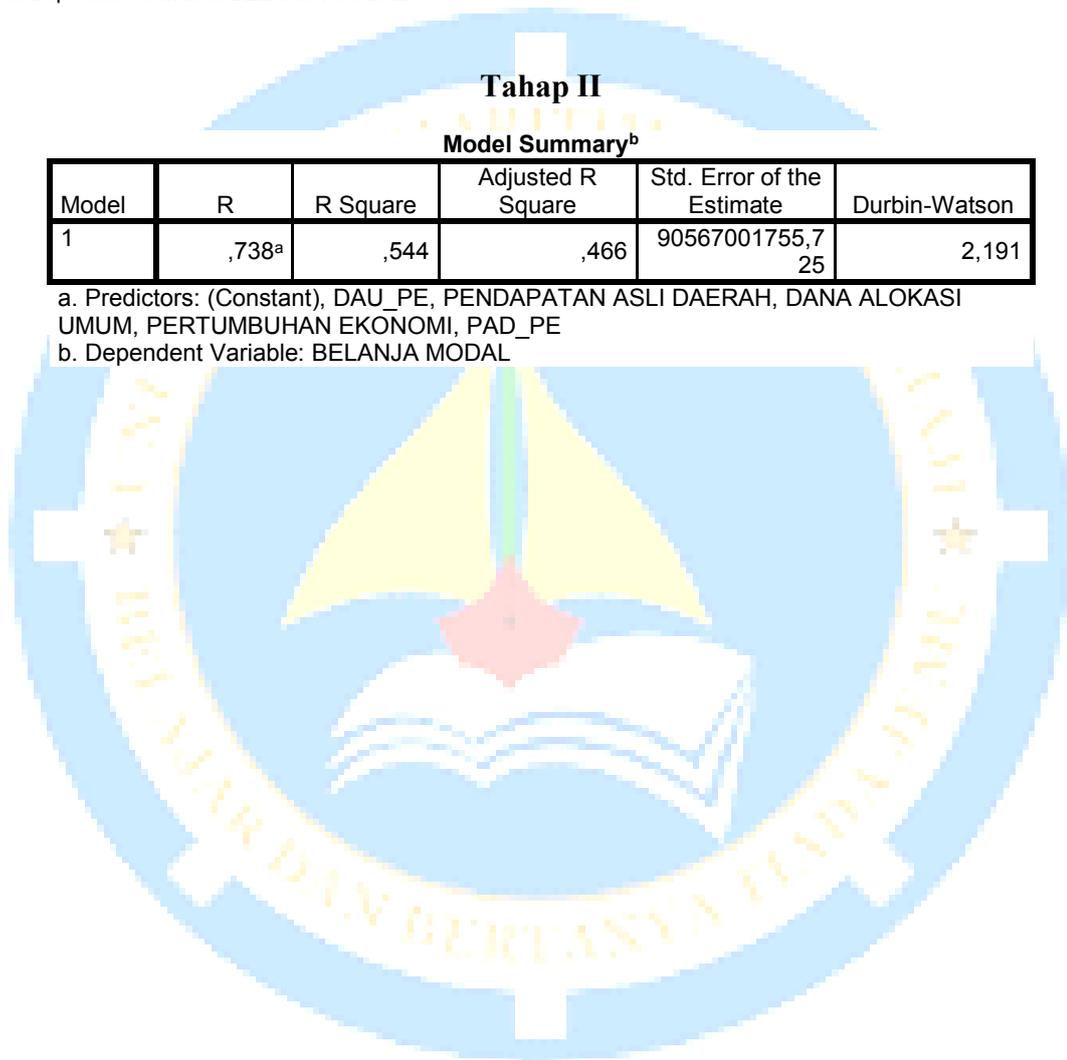
Tahap II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,738 ^a	,544	,466	90567001755,7 25	2,191

a. Predictors: (Constant), DAU_PE, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD_PE

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : NURHASANAH
 Tempat ,tanggal lahir : Tanjungpinang, 11 Novermber 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum menikah
 Nomor Telepon : 085765581351
 Media Sosial : (ig : haaasaanah)
 Email : haaasaanah@gmail.com
 Alamat : Jl.Sutan Syahrir Kp.Yudowinangun No.36



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN.006 Tanjungpinang Barat
 SMP : PONPES AL-KAUTSAR Tanjungpinang Timur
 SMA : SMAN.002 Tanjungpinang Barat
 Perguruan Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

KELUARGA

Ayah : H. TARMIZI
 Ibu : Hj. MAIDARNIS
 Kakak : Fitri Maiziani, M.Pd
 Abang : Muhammad Irfan, Zulfikri, Fajrul Madani, S.Kom
 Adik : Aisyah, Muhammad Iqbal
 Anak : Anak ke 5 dari 7 bersaudara